

RINGKASAN

M. Dana Ananda Putra Nasution 190510016 **Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung (Studi Penelitian Desa Batee VIII, Kecamatan Simpang Keramat, Aceh Utara)**
(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum dan Dr. Arnita S.H., M.H.)

Perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 44 sampai 49 PERMEN ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang memberikan penyelesaian bagi sengketa sampai saat ini belum didapatkan kepada warga Desa Batee VIII terhadap sengketa lahan hak guna usaha dengan PT. Setya Agung yang dianggap telah mengklaim lahan pribadi dan mengambil wilayah Desa Batee VIII secara sepihak yang pada akhirnya memicu berkembangnya konflik perebutan lahan antara warga dan perusahaan yang merasa sama-sama memiliki hak yang sah atas lahan tersebut, konflik sengketa sampai saat ini belum mendapatkan titik terang untuk penyelesaiannya dan perlindungan hukumnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, hambatan, dan serta upaya perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah terhadap lahan warga dalam sengketa penetapan Hak Guna Usaha PT. Setya Agung di Desa Batee VIII Simpang Keramat berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap pemberian penyelesaian dan perlindungan hukum dalam kasus sengketa lahan dan pertanahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.

Perlindungan hukum kepada warga dalam konflik perebutan hak atas kepemilikan lahan belum diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Hambatan dalam masalah ini berupa terjadinya perebutan dan pengakuan hak atas lahan, perusahaan menolak dianggap telah menyerobot lahan dan mengaku memiliki sertifikat HGU, warga menunggu pembentukan tim panitia penyelesaian sengketa yang dijanjikan pada audiensi dengan DRA dan BPN namun BPN mengaku tidak mengetahui permasalahan dan tidak adanya surat laporan kasus.

Saran dalam penelitian ini adalah DPRA dan BPN Aceh Utara segera memberikan alternatif penyelesaian sengketa, membentuk tim panitia khusus penyelesaian sengketa, mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian non litigasi dengan cara damai dan memberikan rasa adil kepada kedua pihak.

Kata Kunci : Perlindungan, Lahan, Sengketa Hak Guna Usaha,

M. Dana Ananda Putra Nasution
190510016

SUMMARY

***Legal Protection Of Citizens Land in The
Dispute Of Rights and Interest Of
PT.Setya Agung
(Research Studies Batee VIII Village,
Simpang Keramat District, North Aceh)
(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum dan Dr.
Arnita S.H., M.H.)***

The legal protection provided for in articles 44 to 49 of the ATR/BPN No. 21 of the year 2020 which provides for the settlement of the dispute so far has not been obtained to the citizens of the village of Batee VIII against the land dispute for the purpose of business with the P.T. Setya Agung who is considered to have claimed private land and took the territory of the Village of Batee VIII unilaterally which in the end triggered the development of the land conflict between citizens and companies who feel both have legitimate rights to the land, the conflict has so far not received a clear point for its settlement and legal protection.

The purpose of this study is to find out and analyse the legal protection, obstacles, and as well as legal protection efforts provided by the government against citizens' land in the dispute establishment of the right of use of enterprise of the P. Setya Agung in the village of Batee VIII Simpang Keramat based on the provisions of the Indonesian legislation to provide settlement and legal protection in the case of land and land disputes

This research uses a type of qualitative research, with an empirical jurisprudence approach, which is a research procedure that produces data of a descriptive nature through the collection and analysis of primary data through direct interviews with the parties concerned.

The legal protection of citizens in conflict of land ownership rights is not regulated in the ATR/BPN Candy No. 21 of 2020 on the handling and settlement of farm cases, obstacles in this matter are the occurrence of battle and recognition of land rights, the company refuses to be considered to have plundered the land and claims to have a HGU certificate, citizens await the formation of a dispute settlement committee promised at the hearing with the DRA and BPN but BPN claims not to know the problem and the absence of a letter of case report.

Recommendation is that the National Agriculture Agency or related agencies immediately form a special committee to settle disputes, seek the settlement of disputes through the mechanism of the Agrarian Minister's Regulation No. 21 Year 2020, non-litigation settlement by peaceful means and give justice to both parties.

Keywords: Protection, Land, Disputes Enterprise Rights,